

**PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Adde Muhammad Ramadhan Pallantara
NPP. 30.1604
Dosen Pembimbing: Dr. Karno, S.Kom. M.Si**

*Asdaf Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: addepallantara08@gmail.com

ABSTRACT

The Background / (GAP): Government policy concerning freedom of information and citizens to obtain information begin Article 28 Constitution 1945, the rules about SPBE like now are implied in national and local government organizations. The use of information and communication technology used by the district government Bulungan in various forms of governance-based digital. So in the district Government of Bulungan e-government is a means of conveying information related to the implementation of the district administration of Bulungan. **The Study:** The problem is how the application of e-government In the Communication and Informatic Bulungan district. **Method:** The method used in this study is a descriptive method with an inductive approach. The theory used is the application of Harvard JFK School of Government in Indrajit 2006: 13 with three dimensions of support, capacity, and value. The collection technique used was an interview, Observation, and documentation, The informants is 8 informants which are the Head of the Communication and Informatic Bulungan district, the Head of Subject Communication and Informatic, Admin Pantau Bulungan, and the Public. Data analysis techniques used are the Miles and Huberman models. **Results:** Studies show that digitalization policies have been carried out with various advantages and shortages. Dimensions support shows that policies are based on rules, The bureaucratic structure, and active participation district in support of this application. Capacity dimensions for sustainability are very good, but for an increase to the next level still shows a lack of professional support in the field, budget, and infrastructure. Value dimensions show that public information services benefit governments by making it easier to transmit information to the public, But for public information, there are still a lot of people who don't know it.

Keywords: Government Based Digital, Electronic Government, Government Based on Electronic System, Pantau Bulungan Application, Website

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan pemerintahan tentang keterbukaan informasi dan setiap warganya berhak untuk mendapat informasi dimulai dengan Pasal 28 UUD 1945 sehingga berkembangnya aturan tersebut hingga terjadinya aturan tentang SPBE seperti sekarang hal ini diterapkan di organisasi pemerintah nasional dan daerah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam berbagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Sehingga dalam *E-Government* sebagai sarana pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Bulungan. **Tujuan:** Masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Penerapan "*HARVARD JFK SCHOOL OF GOVERNMENT*" dalam Indrajit 2006:13 dengan tiga dimensi yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, jumlah informan yaitu sebanyak 8 informan yang terdiri dari Kadis Kominfo, Kabid Diskominfo, Admin Pantau Bulungan dan Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Cocclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan). **Hasil:** Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan digitalisasi penyampaian informasi publik telah dilaksanakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Dimensi *Support* memperlihatkan bahwa kebijakan didasari oleh peraturan, struktur birokrasi dan partisipasi aktif Kabupaten Bulungan dalam mendukung terlaksananya aplikasi ini. Dimensi *Capacity* untuk keberlangsungan sudah sangat baik namun untuk peningkatan ke level berikutnya masih memperlihatkan kekurangan dari dukungan tenaga ahli di bidang IT, anggaran dan infrastruktur. Dimensi *Value* memperlihatkan bahwa pelayanan informasi publik berbasis digital memberi manfaat kepada pemerintah dengan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, namun untuk informasi untuk masyarakat masih kurang maksimal dan masih banyaknya yang tidak mengetahuinya.

Kata Kunci : Pemerintahan berbasis digital, *E-Government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Pantau Bulungan, Website.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini memberikan dampak yang besar dalam perkembangan globalisasi secara mudah globalisasi diambil dari kata global, menurut (Budi Winarno, 2004: 39) dalam (Puspitasari, 2016). Globalisasi adalah merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain dan saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, maupun lingkungan. (Puspitasari, 2016) Globalisasi pertama diperkenalkan oleh Theodore Levitte: 1985. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat maka muncul sebuah ide untuk menanamkan teknologi informasi kedalam sistem pemerintahan dengan nama *electronic government*.

E-government, yang juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government*, dan dalam beberapa model disebut dengan *transformational government* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah bagi warganya untuk memberikan pelayanan, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang terkait dengan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Contohnya adalah pengolahan data, informasi dan proses kerja secara elektronik. berikut adalah beberapa definisi *electronic government*.

- Bank Dunia: *E-Gov* Merujuk kepada dengan teknologi informasi itu oleh pemerintah badan yang menyediakan berkaitan dengan, pembisnis, dan badan pemerintah lainnya.
- UNDP (*United Nation Development Programme*) *E-Gov* adalah aplikasi teknologi komunikasi dan informasi yang dibuat oleh Lembaga pemerintah.
- Pemerintah Amerika Serikat *E- government* merujuk kepada pelayanan secara daring dan informasi pemerintah menggunakan internet atau media digital lainnya.

Mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan untuk memberikan pelayanan pemerintah. *E-government* membuat peluang baru bagi pemerintahan untuk melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan efisiensi. Berikut adalah beberapa manfaat menurut (Indrajit, 2006)

- Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas pemerintah
- Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi di pemerintahan
- Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi lebih berkualitas

Perlu diketahui *E-Gov* bukan sebuah hal yang mudah dan murah untuk diterapkan perlunya pemikiran matang dan rencana yang tepat, *E-Gov* tidak dapat dibangun hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang *business process* yang ada di pemerintahan (Indrajit, 2006).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan permasalahan yang tertulis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026, diawali dengan permasalahan utama dimana Penataan Struktur Organisasi Diskominfo khususnya terkait dengan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi adalah Tata Kelola Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik dalam konteks pelayanan publik yang berbasis IT, Akseibilitas, konektifitas dan mobilitas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu **Pertama** “Penerapan aplikasi e-performance di kantor dinas ketenagakerjaan kota makassar” (Ananda Ibrahim, 2022). Penelitian yang dilakukan Ananda Ibrahim memiliki lokus dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan menggunakan teknik pengumpulan data metode kuisisioner dan Fokus penelitian adalah aplikasi yaitu aplikasi E-Performance, menggunakan teori penerapan indrajit. kesimpulan yang didapat dari responden maka ketiga dimensi Support, Capacity dan Value memiliki presentase yang suda bagus. **Kedua** “Penerapan sistem informasi manajemen (sim) terhadap efektivitas kerja pada apotek wahdah cabang abdesir” (Mariyani, 2020). Penelitian Mariyani memiliki Lokus penelitian pada Apotek Wahdah Cabang Abdesir, fokus pada sistem informasi manajemen pada apotek wahdah dan persamaan menggunakan teknik pengumpulan data obeservasi, wawancara dan dokumentasi. kesimpulan oleh peneliti melalui wawancara menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Apotek Wahdah Cabang Abdesir Sangat Efektif. **Ketiga** “Implementasi aplikasi portal analisis data berbasis peta (panada) studi di badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kota Manado” (Fernando Septian Maatoke, dkk, 2020). Penelitian Fernando Septian Maatoke dan dkk memiliki perbedaan Lokus penelitian dilakukan di Bappeda kota Manado, Menggunakan teori implementasi pelayanan publik dan persamaan fokus penelitian pada aplikasi portal Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA dengan kesimpulan portal tersebut dibangun sebagai informasi yang berbasis geospasial yang akurat, mutakhir dan unified atau dapat menjadi satu basis/referensi data. Kemudian dapat dimanfaatkan secara mudah oleh internal perangkat daerah pemerintah kota Manado dan oleh

masyarakat. **Keempat** “Faktor sukses penerapan E-Government dalam program sistem informasi kesejahteraan sosial Next generation (siks-ng) di Kabupaten Gowa” (Nur, 2021). Penelitian Nur memiliki lokus penelitian dilakukan di Dinas Sosial di Kabupaten Gowa dan yang diteliti adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng), dengan menggunakan teori Penerapan Harvard JFK School of Government, dalam (Indrajit, 2016) dengan kesimpulan Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah sudah dikatakan sangat baik, Capacity atau Kapasitas di nilai sudah sangat baik, dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu operator telah dibekali dengan ilmu dan skill dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial di kecamatan-kecamatan, Value atau Manfaat dari adanya program SIKS-NG di Kabupaten Gowa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan lebih akuratnya data, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, lebih transparan dalam penyaluran bantuan. **Kelima** “Penerapan aplikasi pelayanan desa berbasis mobile dengan Konsep smart village di desa pegantenan, kecamatan Pegantenan kabupaten pamekasan” (Prayogi, 2020). Penelitian Prayogi dkk memiliki lokus dilakukan didesa Pegantenan menggunakan teori R&D (Research and Development) dengan melakukan penelitian kepada aplikasi mobile dengan hasilnya adalah berupa sistem aplikasi pelayanan Desa Pegantenan yang berbasis mobile. Selain aplikasi mobile juga ada aplikasi web yang digunakan sebagai administrator. Aplikasi mobile ditujukan untuk warga sedangkan aplikasi web ditujukan untuk admin yaitu perangkat desa. Sistem aplikasi yang berbasis mobile dan web memungkinkan warga dapat mengakses sistem dimana saja dan kapan saja sehingga meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Desa kepada warga atau masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian ini penulis akan, penulis menggunakan teori penerapan menurut riset “HARVARD JFK SCHOOL OF GOVERNMENT” (dalam Indrajit, 2006,13) dengan tiga dimensi yaitu Support, Capacity dan Value. Fokus penelitian ini adalah E-government dan terkhusus Aplikasi Pantau Bulungan dengan Lokus Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya mengingat lokus yang dilakukan berbeda dan fokusnya bukanlah aplikasi yang sama, namun penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi penulis dalam menyusun metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendikripsikan dan menganalisis penerapan *E-government* dalam penerapannya di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun operasionalisasi konsep penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan teori penerapan menurut "*Harvard JFK School of Government*" dengan dimensi *Support, Capacity dan Value* (dalam Indrajit, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data terdiri dari Data Primer dan Sekunder. Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisis penelitian yang digunakan, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification L*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan dalam Penelitian ini yang dianalisis dengan menggunakan konsep teori penerapan menurut "*Harvard JFK School of Government*" (dalam Indrajit, 2006).

3.1 Support

a) Political Will

Kebijakan yang mendasari pembangunan *E-Government* tersebut di mulai dari UUD 1945 pasal 28F yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mengelola informasi. Kemudian ditambah Instruksi Presiden rebulik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Untuk memperjelas regulasi sebelumnya, maka UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelyanan publik dengan memanfaatkankn teknologi yang ada, kemudian UU Nomor 14 tahun 2008 dibuat, guna menjelaskan lebih detail tentang keterbukaan informasi publik dan apa saja yang disediakan oleh umum, jenis-jenisnya, dan beberapa hal lainnya. Maka pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Guna memperkuat semua regulasi dan Undang-Undang yang sudah ada secara lebih detil dan rinci tentang pelaksanaannya. Maka kebijkaan tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bulungan dengan membuat Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik, pada peraturan ini menjelaskan aturan dalam pelaksanaan pelayanan SPBE. Maka rentetan peraturan yang sudah disebutkan di atas menjadikan dasar pembentukan ini dengan tujuan sebagai keterbukaan informasi pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat.

b) Kontinuitas

Pada website DKIP Bulungan ditemukan bahwa masih belum maksimalnya penerapan website DKIP Bulungan, pada saat dibuka website ini dalam keadaan setengah aktif, Lalu semua fitur yang ada ketika dibuka beberapa menampilkan halaman kosong, juga berita yang terakhir di unggah pada laman tersebut pada tanggal 26 April 2023, kemudian tampilan website ini sangat terlihat rusak sehingga dari segi tampilan websitenya belum bisa dikatakan baik dimana terlihat codingan-codingan yang bocor dan muncul pada halaman utama. Kemudian untuk *update* pada aplikasi pantau bulungan ini dilakukan menyesuaikan dengan *update* dari android sendiri, jadi dalam melakukan update tidak bisa disebutkan kapan tanggal pasti namun dalam setahun pasti dilakukan *update* dengan menyesuaikan *update* dari *android* itu sendiri, hal ini bertujuan agar aplikasi ini tetap kompatibel dan bisa dijalankan oleh *android* paling terbaru sekalipun. Menurut arsip dokumen yang ada pada Diskominfo Kabupaten Bulungan yaitu dokumen Laporan Akhir PPTK Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, maka tercatat Aplikasi Pantau Bulungan dan PPID ini sudah dilakukan pembaruan rutin setahun sekali mulai dari tahun 2020 pada laporan Akhir PPTK.

c) Sosialisasi

Tersedianya Spanduk/Baliho merupakan salah satu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibuatlah baliho/spanduk yang merupakan salah satu kegiatan yang harus dipenuhi oleh bidang Kominfo sebagai sarana sosialisasi yang berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan seperti cetak baleho/spanduk. Pada Aplikasi Pantau Bulungan sosialisasi pertama yang dilakukan hanya dari antar pegawai kabupaten bulungan yang berjenjang mulai dibuatkan poster tentang aplikasi ini di *website* kabupaten Bulungan dan juga video singkat yang mempromosikan aplikasi ini. Maka dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *youtube* dan sosial media pelaksanaan sosialisasinya sudah dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini menurut penulis sudah sangat cukup untuk melakukan sosialisasi terhadap aplikasi ini.

3.2 Capacity

a) SDM

diketahui dalam hal SDM terutama untuk bagian teknis dalam teknologi informasi kita masih kurang jika ingin bersaing dengan daerah yang lebih maju, Kemudian pada Sumber daya manusia untuk aplikasi pantau bulungan sudah terbilang mampu untuk melakukan tugasnya sebagai admin dari aplikasi, dikarenakan pembagian admin bersifat fleksibel dimana antara admin akan bergantian dalam mengupload berita hal ini berguna disaat salah satu admin yang mengharuskan *upload* namun sedang dinas luar, sedang berada di *blind spot* atau sedang berhalangan sehingga informasi berita tetap berjalan dan tidak tertunda. Untuk pembagian admin yang bertugas menjadi dua yaitu Berita dan Agenda Pemerintahan yang dikepalai dari bagian Prokompim seperti yang disebut dalam wawancara sebelumnya admin ini memiliki masing-masing tugas yang berjenjang dari yang paling atas hingga paling bawah dengan tujuan agar informasi yang diberikan terus berjalan.

b) Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan mendapat alokasi dana sebesar Rp 5.488.992.176,00 Yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 5.440.242.504,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 48.749.672,00 sebelum perubahan. Sedangkan alokasi anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp 6.147.615.152,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 5.883.632.030,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 263.983.122,00 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 4 program dengan 24 sub kegiatan. Maka penulis dapat menyimpulkan kemampuan dari anggaran itu sendiri kedua aplikasi sudah memilikinya sebagai penunjang untuk keberlangsungan aplikasi ini dimana kita tahu diperlukan uang untuk menyewa *hosting domain* karena jika tidak aplikasi tidak dapat dipublikasikan, dengan hal itu penulis dapat mengatakan anggaran untuk aplikasi ini sudah terlaksana.

c) Infrastruktur

Pada infrastruktur penerapan *E-Government* ini maka perlu sebagai peningkatan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing masing level menunjukkan karekteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Pada indikator ini kemudahan masyarakat memperoleh akses informasi melalui internet gratis adalah masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan akses internet di tempat/fasilitas umum di Tanjung Selor sehingga

konektifitas masyarakat semakin meningkat. Tahun 2022 melalui Wifi gartis Bulungan Hebat dapat terpasang 20 Hot Spot dengan speed 20 Mbps dari 20 Hot spot yang ditargetkan. Diketahui infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan masih terbilang jauh jika ingin menjadikan SPBE yang terintegrasi dengan beberapa faktor penghambat yang telah disebutkan di atas. Maka sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan.

3.3 Value

a) Manfaat Untuk Pemerintah

Dari manfaat untuk pemerintah itu sendiri banyaknya pegawai yang merasa sangat terbantu dengan aplikasi ini, bisa dikatakan aplikasi ini hampir semua pegawai kabupaten Bulungan menginstal aplikasi ini sebagai sarana mereka untuk mencari informasi terkait keberadaan pimpinan dan agenda kegiatan yang sedang berlangsung atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bulungan. Manfaat untuk pemerintah itu sendiri sangatlah besar terutama untuk ASN dalam menggunakan aplikasi pantau bulungan ini yang bisa mendapat informasi dengan sangat mudah, menurut saya yang menjadi nilai lebih untuk penerapan E-government untuk ASN yaitu fitur keberadaan pimpinan daerah dan agenda pimpinan yang pasti hal informasi inilah berguna untuk ASN.

b) Manfaat Terhadap masyarakat

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bulungan, PPID Utama maupun PPID 20 Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website PPID Utama. Sampai dengan akhir tahun 2022 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 158 DIP dengan rincian 95 DIP Berkala, 44 DIP Setiap Saat, 5 DIP Serta Merta dan 0 DIP Dikecualikan. Sedangkan dari 40 OPD Jumlah DIP yang ada tersedia sebanyak 1185 DIP. Dengan rincian 857 DIP Berkala, 304 DIP Setiap Saat, 5 DIP Serta Merta, dan 0 DIP Yang dikecualikan yang artinya terjadi peningkatan dari tahun 2022, dimana 90 % OPD melakukan pemutakhiran data Daftar Informasi Publik Kab. Bulungan atau 39 OPD se Kab. Bulungan menyerahkan DIP OPD kepada PPID Utama dari 40 OPD, Kecamatan Tanjung Palas Timur, sejak tahun 2022 tidak mengumpulkan DIP OPD nya. Tidak dilaksanakannya rapat uji konsekuensi. Pada pelaksanaan PPID ini bisa dikatakan sudah berjalan namun pada website PPID pada saat penulis mencoba untuk membukanya yang ditemukannya website yang akunnya Suspended, hal ini menjadi catatan bahwa perlunya perbaikan sesegera mungkin terhadap website PPID ini.

Kemudian pada jumlah pengunjung yang tertulis lebih 200 kunjungan untuk Permintaan Informasi pada tahun 2022 tertulis +200 dan 170 permintaan informasi, hal ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya masyarakat bulungan yang masih kurang mengetahui tentang adanya pelayanan PPID ini dimana jumlah yang ada masih sangat jauh dengan jumlah penduduk Kabupaten Bulungan . Aplikasi Pantau Bulungan ini, dimana informasi yang ditampilkan sangat bagus dimana ada agenda pemerintah, keberadaan pimpinan, berita pemeritahan, tempat wisata, nomor darurat. Informasi-informasi tersebut sangat berguna untuk masyarakat bulungan ataupun orang luar yang tidak mengetahui Bulungan dimana ada informasi seperti tempat wisata dan hotel. Manfaat untuk masyarakat sendiri menurut penulis masih belum maksimal dikarenakan terbukti banyak masih masyarakat yang masih kurang mengetahui apa saja pelayanan publik secara online dan aplikasi terutama Pantau Bulungan dan bagaimana dengan hasil *review* dan jumlah *download* di *playstore*? Penulis berpendapat dan juga diperkuat dengan hasil semua wawancara yang sudah dijabarkan diatas bahwa bisa saja mayoritas dari yang *download* aplikasi ini bisa saja dari ASN Kabupaten Bulungan, maka pemerintah Kabupaten Bulungan perlunya melakukan inovasi-inovasi yang meningkatkan ketertarikan masyarakat terutama masyarakat seputaran Kabupaten Bulungan ini.

Diketahui aplikasi ini masih kurang maksimal dalam manfaatnya untuk masyarakat dikarenakan aplikasi ini ketimbang diketahui masyarakat aplikasi ini lebih banyak dikenal oleh ASN Kabupaten Bulungan maka untuk mengatasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan memiliki rencana kedepan dalam upaya meningkatkan manfaat terhadap masyarakat.

3.4 Faktor Penghambat dalam Penerapan E-Government di Diskominfo Bulungan

Pada dimensi ini peneliti mencari tahu hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan E-Government di Diskominfo Bulungan, adapun dimensinya adalah hambatan yang di hadapi dari dalam (Internal) dan hambatan yang dihadapi dari luar (Eksternal).

a) Hambatan Internal

Diketahui dalam hal SDM terutama untuk bagian teknis dalam teknologi informasi kita masih kurang jika ingin bersaing dengan daerah yang lebih maju Mengetahui kurangnya dalam SDM membuat pemerintah Kabupaten Bulungan masih banyak menggunakan jasa pihak ketiga kelemahan atau kekurangannya jika membuat aplikasi menggunakan jasa pihak ketiga dengan menggunakan kontrak kerja, maka yang memegang kunci dari aplikasi tersebut adalah pihak ketiga itu sendiri, jika nanti suatu saat sudah tidak bekerja sama dengan pihak tersebut maka kuncinya

akan dibawa dan pihak tersebut bisa melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemerintah. Oleh karena itu perlunya pemerintah Kabupaten meningkatkan SDM yang sekiranya memang diperlukannya tenaga ahli.

Infrastruktur aplikasi ini bisa dibidang cukup baik jika untuk keberlangsungannya namun jika untuk mengembangkannya menjadi infrastruktur SPBE yang lebih tinggi terbilang kurang, memang bisa dibidang sulit dikarenakan perlunya anggaran yang besar, SDM yang memiliki skill yang memadai dan juga tantangan yang cukup besar adalah dalam melakukan konektifitas masih sangat sulit dikarenakan mengubah yang sudah ada lebih sulit dianding dengan membuat yang baru diketahui bahwa pemerintahan Bulungan masih menggunakan Bangunan lama yang membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan lebih banyak usaha terutama dalam anggaran.

b) Hambatan Eksternal

Masih sedikit masyarakat yang belum memahami E-Government Diskominfo Bulungan yang disini adalah pelayanan informasi publik sebagai contoh dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Aplikasi Pantau dimana aplikasi ini masih sepi peminat terutama para masyarakat mengingat banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan aplikasi media sosial ketimbang aplikasi Pantau Bulungan ini.

3.5 Upaya Diskominfo Bulungan mengatasi hambatan

a) Upaya Hambatan Internal

Pemerintah Kabupaten Bulungan tahu betul bahwa dikarenakan SDM yang masih sangat terbatas membuat pemerintah Kabupaten Bulungan masih menggunakan pihak ketiga yang beberbentuk kontrak sebagai tenaga ahli. Memang untuk saat ini pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri sangat membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan secara teknis dalam mengembangkan SPBE namun dikarenakan untuk melakukannya memerlukan waktu yang lama jadi untuk saat ini sambil perlahan untuk melakukan perekrutan yang sesuai. maka Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan pencegahan yang terbaik untuk saat ini, dengan upaya Dinas Kominfo kedepannya sebelum melakukan tanda tangan kontrak dinas kominfo akan menelaah surat perjanjian itu dengan sangat detil sebelum ditanda tangani guna mencegah hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Diketahui infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan masih terbilang jauh jika ingin menjadikan SPBE yang terintegrasi dengan beberapa faktor penghambat yang telah disebutkan di atas. Maka sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan. Maka pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pembaharuan secara perlahan yang memang butuh waktu lama namun

perlahan tapi pasti pemerintah Kabupaten Bulungan untuk saat ini ingin meningkatkan konektivitas antara dinas agar terciptanya SPBE yang baik.

b) Upaya Hambatan Eksternal

Diketahui aplikasi ini masih kurang maksimal dalam manfaatnya untuk masyarakat dikarenakan aplikasi ini ketimbang diketahui masyarakat aplikasi ini lebih banyak dikenal oleh ASN Kabupaten Bulungan maka untuk mengatasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan memiliki rencana kedepan dalam upaya meningkatkan manfaat terhadap masyarakat. Maka dengan hal ini upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu akan dilakukannya *survey* kepuasan sehingga akan didapatkan data terkait informasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan terutama untuk kaum milenial.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penerapan E-Government ini sudah banyak yang dilakukan namun memang kurangnya masih masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya, hal ini perlunya menjadi catatan oleh pemerintah dikarenakan sangat disayangkan sistem pelayanan publik yang dibuat dengan sangat baik tetapi tidak digunakan, maka hal ini menjadi sangat disayangkan. Maka dengan adanya beberapa hambatan yang perlunya secara perlahan tapi pasti dilakukannya perbaikan untuk menjadi baik kedepannya oleh karena itu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dimana yang penulis sudah jabarkan diatas.

Berbeda dengan Penelitian Nur, 2021 sebelumnya pada Value atau Manfaat dari adanya program SIKS-NG di Kabupaten Gowa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan lebih akuratnya data penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, jadi program ini dinilai berhasil dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan (nur, 2021)

Kemudian Sumber Daya Manusia yang ada pada diskominfo bahwa penyeberan SDM belum merata sehingga sangat kekurangan SDM pada bidang IT yang akhirnya Diskominfo menggunakan pihak ketiga sebagai ahli pada bidang IT yang memiliki kekurangan salah satunya adalah menggunakan sistem kontrak sehingga setiap tahun bisa berubah-ubah pihak 3 tersebut sehingga dalam pengembangan kedepan akan mengalami hambatan. Berbeda dengan temuan pada penelitian Ibrahim, 2022 di kota Makasar *Capacity* ialah ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan aplikasi e-performance dan value sebagai pemberi layanan dan juga para pegawai sebagai penerima pelayanan e-performance, ini

menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah canggih (Ibrahim, 2022)

begitu juga dengan penelitian Nur, 2021 *E-Government* pada program SIKS-NG di Kabupaten Gowa sudah dikatakan sangat baik. Capacity atau Kapasitas, Ketersediaan sumber daya, dalam mengembangkan *E-Government* di kabupaten Gowa baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial di nilai sudah sangat baik (nur, 2021)

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan hal menarik dimana pada pelayanan informasi aplikasi Pantau Bulungan yang diketahui aplikasi ini sangat sedikit masyarakat mengetahuinya namun pada sisi pemerintahan itu sendiri terutama pada ASN Bulungan aplikasi ini sangat familiar dan banyak mengetahuinya dikarenakan adanya fitur yang sangat berguna didalamnya yaitu keberadaan pimpinan Kabupaten Bulungan, hal ini menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh para ASN.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis jabarkan di atas maka penerapan aplikasi Pantau Bulungan berdasarkan 3 dimensi yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*, maka kesimpulan penulis terkait penerapan Aplikasi Pantau Bulungan ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun harus menjadi catatan bahwa masih ada dimensi yang untuk keberlangsungan aplikasi ini sudah baik namun untuk meningkatkannya kedepan masih kurang dan hal ini harusnya menjadi catatan untuk Diskominfo Kabupaten Bulungan sebagai acuan kedepannya, namun secara keseluruhan penerapan ini sudah cukup baik.

Secara keseluruhan upaya upaya yang telah dijabarkan di atas ada yang belum dilakukan dan ada yang sudah secara perlahan telah dilakukan atau dijalankan, memang dalam melakukan upaya-upaya tersebut sangat diperlukannya waktu dan tenaga untuk melakukannya, menurut penulis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bulungan terkhusus Diskominfo Bulungan sudah benar dikarenakan faktor penghambat ini bukanlah hal yang bisa dihilangkan dengan sangat mudah maka kesimpulan penulis upaya yang dilakukan sudah sangat baik namun yang menjadi catatan hal ini upaya ini tidak langsung akan menghilangkan faktor penghambat namun adanya proses secara perlahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan tentang penerapan E-Government di lokasi yang berbeda.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*.

Fernando Septian Maatoke, J. K. G. U. (2020). *Implementasi Aplikasi Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA) Studi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2.

Ibrahim, A. (2022). *Penerapan Aplikasi E-Performance di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar*.

Mariyani. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terhadap Efektivitas Kerja Pada Apotek Wahdah Cabang Abdesir*.

Nur, M. (2021). *Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa*.

Prayogi, Y., Hardiansyah, F., Ramadijanti, N., Ahsan, A., & Erifani, U. (2020). *Penerapan Aplikasi Pelayanan Desa Berbasis Mobile Dengan Konsep Smart Village di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan*. 4(1).

Puspitasari, R. (2016). Dampak Munculnya Globalisasi Bagi Masyarakat Dunia. *Pertemuan5pmg*.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2023

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Berbasis Elektronik

Pallantara, Adde. 2023. Penerapan *E-Government* Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Jatinangor : IPDN

